



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Kitab Perundang-Undangan Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)

Buku

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sertipikat dan Permasalahannya*, (Jakarta: Persatsi Pustaka, 2002)

Arba, *Hukum Agraria indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2003)
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1979)
- G.Kartasapoetra, et,al, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985)
- Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: Tatanusa, 2018)
- J. Andi Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014),
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum Informasi Menyesatkan (Misleading Information) dalam Prospektus Go Public*, (Tangerang, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2018)
- Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)

Jurnal

- Darwis Anatami, “*Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi sertipikat Ganda Atas Sebidang Tanah*”, Samudera Keadilan, Vol.12, No. 1, tahun 2017.
- Mudakir Iskandar Syah, “*sertipikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 4, No. 2, 2014. Doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.97>
- Hairul Maksum, “*Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*”, Juridica, Vol. 2, No. 1, (2020). Doi: <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.178>
- I Kadek Edy Gunawan, A. A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “*Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara*

Perdata”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2549.358-361>

Mudemar A. Rasyidi, “*Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 12, No. 2, (2021)

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, (2016). Doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>

Reynaldi A. Dilapanga, “*Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960*”, Lex Crimen, Vol. VI, No. 5, (2017)

Kamus atau Encyclopedia

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://www.kemdikbud.go.id/)

Website

Aisyah Sekar Ayu Maharani, “Hanya 2 Juta Hektar Tanah Papua yang Bisa Disertifikatkan” <https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/17/073000321/hanya-2-juta-hektar-tanah-papua-yang-bisa-disertifikatkan>, diakses pada 27 Oktober 2022

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor:18/Pdt.G/2018/PN Nab

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 94/PDT/2018/ PT JAP

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3559 K/Pdt/2019